

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017**

**Balai Besar Karantina Pertanian Makassar**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



Jl. Perintis Kemerdekaan Km.12 Makassar  
Email : [bbkp.makassar@gmail.com](mailto:bbkp.makassar@gmail.com)  
<http://www.bbkp-makassar.com/>

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

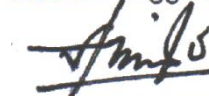
Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Makassar, 15 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran



DR. Drh SYAFRIL DAULAY  
NIP 195810191983031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja Pegawai

B.3 Belanja Barang

B.4 Belanja Modal

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.4.3 Belanja Modal Lainnya

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.3 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Tanah

C.2.2 Peralatan dan Mesin

C.2.3 Gedung dan Bangunan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3 Aset Lainnya

C.3.1 Aset Tak Berwujud

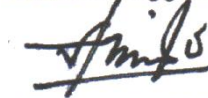
- C.3.2 Aset Lain-lain
- C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- C.4 Kewajiban Jangka Pendek
  - C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga
- C.5 Ekuitas
  - C.5.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
  - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
  - D.2 Beban Pegawai
  - D.3 Beban Persediaan
  - D.4 Beban Barang dan Jasa
  - D.5 Beban Pemeliharaan
  - D.6 Beban Perjalanan Dinas
  - D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
  - D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1 Ekuitas Awal
  - E.2 Surplus/Defisit-LO
  - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
  - E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
    - E.4.1 Koreksi Lain-lain
    - E.4.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
    - E.4.3 Koreksi Nilai Persediaan
    - E.4.4 Penyesuaian Nilai Aset
    - E.4.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap
  - E.5 Transaksi Antar Entitas
    - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
  - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2 Pengungkapan Lain-lain

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, , 08 Januari 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran



DR. Drh SYAFRIL DAULAY  
NIP 195810191983031001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.192.573.079,00 atau mencapai 135,68% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.090.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp22.824.352.597,00 atau mencapai 98,84% dari alokasi anggaran sebesar Rp23.091.381.000,00

### II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp133.986.665.690,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp658.039.497,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp133.223.446.234,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp105.179.959,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp49.825.851,00 dan Rp59.893.017.425,00.

### III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.181.002.543,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp25.469.170.881,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-21.288.168.338,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-29.270.807,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-21.317.439.145,00.

### IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp59.893.017.425,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-21.317.439.145,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp78.761.667.522,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp18.672.976.148,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp136.010.221.950,00.

#### **V Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.090.000.000,00	4.192.573.079,00	135,68	2.363.407.730,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>3.090.000.000,00</b>	<b>4.192.573.079,00</b>	<b>135,68</b>	<b>2.363.407.730,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.2	11.955.705.000,00	11.902.295.268,00	99,55	11.062.856.649,00
Belanja Barang	B.3	8.964.464.000,00	8.757.581.529,00	97,69	9.970.755.191,00
Belanja Modal	B.4	2.171.212.000,00	2.164.475.800,00	99,69	6.242.486.318,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>23.091.381.000,00</b>	<b>22.824.352.597,00</b>	<b>98,84</b>	<b>27.276.098.158,00</b>



## II. NERACA

**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	17.266.800,00	4.306.679,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2	4.992.170,00	4.204.125,00
Persediaan	C.1.3	635.780.527,00	966.608.477,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>658.039.497,00</b>	<b>975.119.281,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1	85.670.372.000,00	20.717.512.800,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	30.718.200.161,00	29.882.711.161,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	36.306.298.700,00	24.289.603.575,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	8.080.367.724,00	8.123.289.847,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	32.745.000,00	32.745.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-23.563.471.451,00	-20.577.209.429,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-617.215.136,00	-2.434.457.580,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-3.403.850.764,00	-3.069.305.610,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>133.223.446.234,00</b>	<b>56.964.889.764,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	53.000.000,00	18.000.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2	2.316.654.766,00	2.316.654.766,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.3	-2.254.349.807,00	-2.206.760.789,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-10.125.000,00	-4.875.000,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>105.179.959,00</b>	<b>123.018.977,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>133.986.665.690,00</b>	<b>58.063.028.022,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	49.825.851,00	243.392.708,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>49.825.851,00</b>	<b>243.392.708,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>49.825.851,00</b>	<b>243.392.708,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.5.1	59.893.017.425,00	59.893.017.425,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>59.893.017.425,00</b>	<b>59.893.017.425,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>59.942.843.276,00</b>	<b>60.136.410.133,00</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	4.181.002.543,00	2.366.589.035,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>4.181.002.543,00</b>	<b>2.366.589.035,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	11.716.435.268,00	11.248.716.649,00
Beban Persediaan	D.3	927.644.378,00	1.370.330.616,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.371.846.894,00	4.215.120.890,00
Beban Pemeliharaan	D.5	2.103.873.353,00	1.875.417.408,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.698.180.618,00	2.817.702.223,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	4.651.190.370,00	4.757.991.325,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>25.469.170.881,00</b>	<b>26.285.279.111,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-21.288.168.338,00</b>	<b>-23.918.690.076,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	11.600.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	567.386.087,00	21.205.352,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	608.256.894,00	12.288.019,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-29.270.807,00</b>	<b>8.917.333,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-21.317.439.145,00</b>	<b>-23.909.772.743,00</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	59.893.017.425,00	59.872.368.807,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	-21.317.439.145,00	-23.909.772.743,00
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	0,00	0,00
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4		
Koreksi Lain-lain	E.4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2	45.003.457.000,00	-34.065.682,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.3	34.235.500,00	54.714.300,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.4	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.5	33.723.975.022,00	0,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	18.672.976.148,00	24.937.490.428,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>136.010.221.950,00</b>	<b>60.920.735.110,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

##### Visi dan Misi

Visi

**”Menjadi karantina yang handal dan akuntabel dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati guna pencapaian swasembada pangan dan mendorong akselerasi ekspor serta ketahanan dan keamanan pangan di Sulawesi Selatan”**

##### Misi

Adapun Misi dari Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantinaan dalam melindungi sumber daya hayati hewan/tumbuhan dari ancaman HPHK/OPTK dan pangan segar dari cemaran nuklir, biologi, dan kimia.
2. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional.
3. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional.
4. Mewujudkan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2008.
5. Meningkatkan kompetensi sebagai Laboratorium Pengujian (*Testing Laboratory*) mengimplementasikan secara konsisten SNI 17025:2008.
6. Meningkatkan kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan sistem komputerisasi.

##### Sejarah Badan Karantina Pertanian

Terminologi “karantina” berasal dari bahasa Latin “QUARANTA” yang berarti empatpuluh. Istilah tersebut lahir sekitar abad XIV, ketika penguasa di Venezia menetapkan batas waktu yang diberlakukan untuk menolak masuk dan merapatnya kapal yang datang dari negara lain, untuk menghindari terjangkitnya penyakit menular. Awak kapal dan penumpangnya diharuskan untuk tinggal dan terisolasi di dalam kapal selama 40 hari, untuk mendeteksi kemungkinan terbawanya penyakit.

Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa hama atau penyakit pada makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, dapat menular dari satu wilayah ke wilayah Negara lain melalui lalu lintas manusia atau benda-benda yang menjadi media pembawa. Untuk hama dan penyakit hewan, penularannya dapat terjadi melalui lalu-lintas hewan dan produk-produknya, organisme pengganggu tumbuhan dapat menyebar melalui tanaman hidup dan bagian tanaman.

Sejarah Karantina Pertanian di Indonesia telah diawali sejak jaman penjajahan Hindia Belanda, hal ini diawali dengan adanya penyebaran penyakit karat daun kopi yang disebabkan oleh *Hemileia vastatrix* di Srilangka. Pemerintah kolonial menyadari bahwa pada saat itu perkebunan kopi di Indonesia merupakan sumber utama pendapatan. Menyadari akan ancaman penyakit tersebut maka pemerintah berusaha keras mencegah penyebaran penyakit tersebut ke Indonesia. Sebagaimana diketahui Areal perkebunan kopi berkembang luas, khususnya di Jawa, sejak Gubernur Jenderal Van den Bosch memperkenalkan Sistem Tanam Paksa ( *Cultuurstelsel* ) pada tahun 1832. Bertitik tolak dari kecemasan Hindia Belanda terhadap penyakit kopi, lahirlah Ordonansi 19 Desember 1877 (Staatsblad No.262) yang melarang pemasukan tanaman kopi dan biji kopi dari Srilanka. Ordonansi tersebut merupakan pertama kali yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perkarantinaan tumbuhan di Indonesia.

Beberapa waktu setelah terbitnya Ordonansi pertama, terbit Ordonansi baru yaitu Ordonansi 28 Januari 1914 (Staatsblad No.161) yang mengatur tentang pengawasan terhadap pemasukan buah-buahan segar dari Australia yang dilakukan oleh seorang ahli. Penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan secara institusional di Indonesia secara nyata baru dimulai oleh sebuah organisasi pemerintah bernama *Instituut voor Plantenziekten en Cultures* (Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya) Pada saat yang bersamaan dapat diketahui bahwa di daerah bagian barat Ausatralia sedang terjangkit hama lalat buah (Mediterranean Fruitfly) atau dikenal dengan nama latin *Ceratitis capitata*. Dari ordonansi inilah dibentuk organisasi penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan secara konstitusi bernama *Instituut voor Platenziekten en Cultures* (Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya).

Pada tahun 1930 pelaksanaan kegiatan operasional karantina di pelabuhan-pelabuhan diawasi secara sentral oleh Direktur Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya, serta ditetapkan seorang pegawai Balai yang kemudian diberi pangkat sebagai *Plantenziektenkundigeambtenaar* (pegawai ahli penyakit tanaman)

Akan tetapi sejak tahun 1939 organisasi karantina yang melaksanakan operasional karantina tumbuhan mengalami perkembangan dan perubahan. Pada tahun tersebut telah ditetapkan Dinas Karantina Tumbuh-tumbuhan (*Plantequarantine Dienst*) yang menjadi salah satu Seksi dari Balai Penyelidikan Hama dan Penyakit Tanaman (*Instituut voor Plantenziekten*). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tahun 1957 Dinas Karantina Tumbuh-tumbuhan ditingkatkan statusnya dari status Seksi menjadi status Bagian.

Pada tahun 1957 dengan Keputusan Menteri Pertanian, dinas tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Bagian.

Pada tahun 1961 BPHT diganti namanya menjadi LPHT (Lembaga Penelitian Hama dan Penyakit Tanaman) yang merupakan salah satu dari 28 lembaga penelitian dibawah Jawatan Penelitian Pertanian. Sebagai kelanjutan kegiatan perkarantinaan pasca kemerdekaan, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 2 Tahun 1961 tanggal 17 Februari 1961 (Lembaran Negara Nomor. 9/1961) serta Peraturan Pelaksanaan Nomor. 6/PMP/1961 dan Nomor. 7/PMP/1961 yang ditunjukkan kepada Direktur Lembaga Pengawetan Alam, Kebun Raya Bogor. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh senior karantina tumbuhan sebelum era TC Inspektur Karantina Tumbuhan Ciawi Bogor.

Tahun 1966 dalam reorganisasi dinas karantina tumbuhan tidak lagi ditampung dalam organisasi Lembaga Pusat Penelitian Pertanian (LP3) yang merupakan penjelmaan LPHT. Kemudian Karantina menjadi salah satu Bagian di dalam Biro Hubungan Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

Pada tahun 1969, status organisasi karantina tumbuhan diubah kembali dengan ditetapkannya Direktorat Karantina Tumbuh-tumbuhan yang secara operasional berada dibawah Menteri Pertanian dan secara administratif dibawah Sekretariat Jenderal. Dengan

status Direktorat tersebut, status organisasi karantina tumbuhan meningkat dari eselon III menjadi eselon II.

Perkembangan organisasi karantina selanjutnya adalah dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 178/Kpts/Org/4/1973 tahun 1973 tentang pemberian kewenangan dari Jawatan Pertanian Rakyat kepada Direktorat Karantina Tumbuhan-tumbuhan.

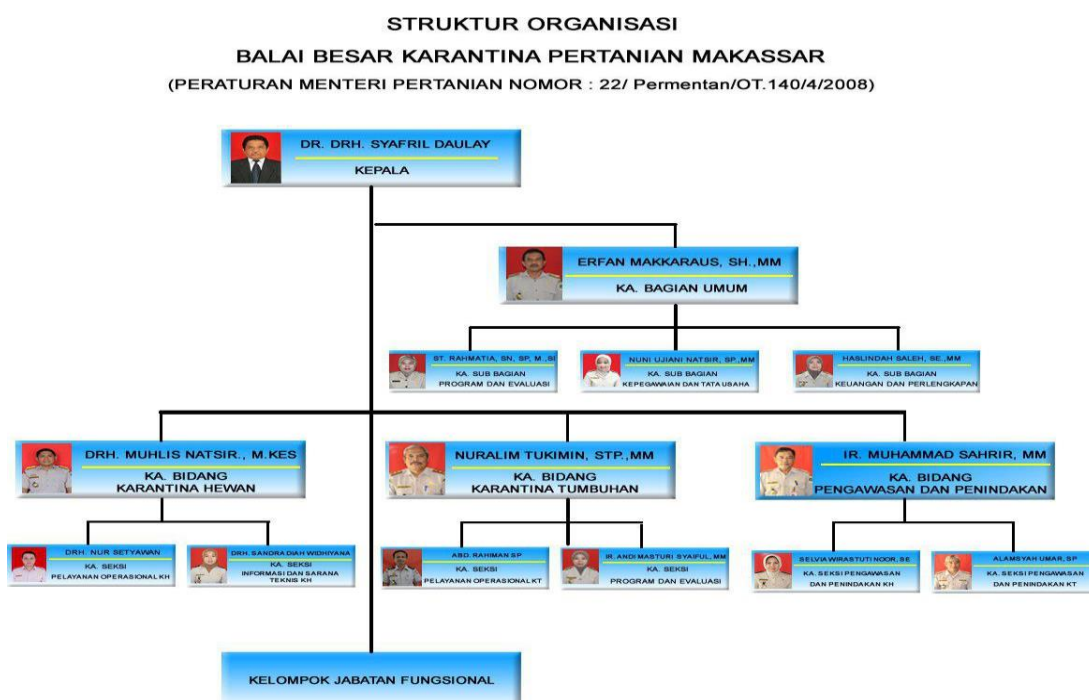
Pada tahun 1974 organisasi karantina diintegrasikan dalam suatu wadah Pusat Karantina Pertanian di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Seiring dengan perkembangan era Orde Baru, organisasi Direktorat Karantina Tumbuhan diubah menjadi Pusat Karantina Pertanian dengan dibentuk cabang Karantina Tumbuhan di seluruh Indonesia dengan status non struktural.

Tahun 1980 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.453/Kpts/Um/Org/6/1980 tahun 1980 dan 861/Kpts/OT-210/12/1980 tanggal 21 Desember 1980, organisasi Pusat Karantina Pertanian (yang notabene baru diisi karantina tumbuhan ex Direktorat Karantina Tumbuhan), mempunyai rentang kendali manajemen yang luas. Pusat Karantina Pertanian pada masa itu terdiri dari 5 Balai (eselon III), 14 Stasiun (eselon IV), 38 Pos (eselon V) dan 105 Wilayah Kerja (non structural) yang tersebar diseluruh Indonesia.

Pada tahun 1983 unsur Pusat Karantina Pertanian yang terdiri atas karantina tumbuhan dan hewan diintegrasikan. Selain itu status sebelumnya di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dialihkan kembali ke Sekretaris Jenderal dengan pembinaan operasional secara langsung di bawah Menteri Pertanian. Sementara Karantina Ikan yang masih embrio terus berproses menjadi Bidang Karantina Ikan pada Kantor Pusat Karantina Pertanian.

Pada tahun 1985 Direktorat Jenderal Peternakan menyerahkan pembinaan unit karantina hewan, sedangkan Badan Litbang Pertanian menyerahkan pembinaan unit karantina tumbuhan, masing-masing kepada Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

Di bidang peraturan perundangan tanggal 8 Juni 1992 adalah yang monumental dan hari yang tidak terlupakan, karena Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang No.16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Perkembangan di bidang legislasi terus berlanjut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan kemudian lahir PP No. 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.



## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Makassar yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah sebagai berikut:

**(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**



- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
    - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
    - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
    - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
  - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	2.150.000.000,00	3.090.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.150.000.000,00</b>	<b>3.090.000.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	10.800.705.000,00	11.955.705.000,00
Belanja Barang	8.910.464.000,00	8.964.464.000,00
Belanja Modal	1.545.314.000,00	2.171.212.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>21.256.483.000,00</b>	<b>23.091.381.000,00</b>

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.192.573.079,00 atau mencapai 135,68% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.090.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	11.716.035,00	0,00
Pendapatan Jasa	3.090.000.000,00	4.149.293.673,00	134,28
Pendapatan luran dan Denda	0,00	18.632.714,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	12.930.657,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.090.000.000,00</b>	<b>4.192.573.079,00</b>	<b>135,68</b>

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 77,40% dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	11.716.035,00	555.276,00	2.009,95
Pendapatan Jasa	4.149.293.673,00	2.327.213.760,00	78,30
Pendapatan Iuran dan Denda	18.632.714,00	35.638.292,00	-47,72
Pendapatan Lain-lain	12.930.657,00	402,00	3.216.481,34
<b>Jumlah</b>	<b>4.192.573.079,00</b>	<b>2.363.407.730,00</b>	<b>77,40</b>

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp22.824.352.597,00 atau 98,84% dari anggaran belanja sebesar Rp23.091.381.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		11.955.705.000,00	11.903.555.659,00	99,56
Belanja Barang		8.964.464.000,00	8.757.581.529,00	97,69
Belanja Modal		2.171.212.000,00	2.166.195.800,00	99,77
<b>Total Belanja Kotor</b>		<b>23.091.381.000,00</b>	<b>22.827.332.988,00</b>	<b>98,86</b>
Pengembalian Belanja			-2.980.391,00	0,00
<b>Total Belanja</b>		<b>23.091.381.000,00</b>	<b>22.824.352.597,00</b>	<b>98,84</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -16,32% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Pegawai Mengalami peningkatan sebesar 7,59 persen karena adanya perubahan kenaikan pangkat/berkala dan perubahan tunjangan keluarga.
2. Belanja Modal mengalami penurunan mencapai 65,33 persen dibanding tahun sebelumnya karena adanya Pembangunan Kantor induk Balai Besar Karantina Pertanian dan pembangunan Kandang di wilayah kerja Bajoe Bone dan wilayah kerja Jeneponto. Sedangkan pada tahun anggaran 2017 tidak dianggarkan lagi .
3. Sedangkan Belanja Barang mengalami penurunan sebesar 12,17 persen dari anggaran sebelumnya karena adanya penataan belanja barang persediaan lebih terinci dalam satu Mata Anggaran Kegiatan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak. Dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Belanja Pegawai	11.902.295.268,00	11.062.856.649,00	7,59
Belanja Barang	8.757.581.529,00	9.970.755.191,00	-12,17
Belanja Modal	2.164.475.800,00	6.242.486.318,00	-65,33
<b>Total Belanja</b>	<b>22.824.352.597,00</b>	<b>27.276.098.158,00</b>	<b>-16,32</b>

## B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.902.295.268,00 dan Rp11.062.856.649,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 7,59% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Belanja Pegawai Mengalami peningkatan sebesar 7,59 persen karena adanya perubahan kenaikan Belanja Lembur yang meningkat disebabkan kegiatan dan semakin meningkat baik di wilayah kerja Bandara Hasanuddin Makassar dan Pelabuhan Laut Makassar serta Wilayah kerja lain dengan sistem kegiatan 7-24 yang artinya tujuh hari kerja dalam 24 jam sehari.

### Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.914.923.659,00	10.037.726.784,00	-1,22
Belanja Lembur	1.988.632.000,00	1.026.962.000,00	93,64
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>11.903.555.659,00</b>	<b>11.064.688.784,00</b>	<b>7,58</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	<b>-1.260.391,00</b>	<b>-1.832.135,00</b>	<b>-31,21</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>11.902.295.268,00</b>	<b>11.062.856.649,00</b>	<b>7,59</b>

## B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.757.581.529,00 dan Rp9.970.755.191,00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar -12,17% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Belanja Barang mengalami penurunan sebesar 12,17 persen dari anggaran sebelumnya karena adanya penataan belanja barang persediaan lebih

terinci dalam satu Mata Anggaran Kegiatan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.706.358.081,00	2.481.898.663,00	9,04
Belanja Barang Non Operasional	753.738.200,00	872.916.275,00	-13,65
Belanja Barang Persediaan	703.471.600,00	1.604.236.354,00	-56,15
Belanja Jasa	920.245.515,00	856.262.798,00	7,47
Belanja Pemeliharaan	1.975.587.515,00	1.337.738.878,00	47,68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.698.180.618,00	2.817.702.223,00	-39,73
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>8.757.581.529,00</b>	<b>9.970.755.191,00</b>	<b>-12,17</b>
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.757.581.529,00</b>	<b>9.970.755.191,00</b>	<b>-12,17</b>

#### B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.164.475.800,00 dan Rp6.242.486.318,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2017 mengalami penurunan sebesar -65,33% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Belanja Modal mengalami penurunan mencapai 65,33 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu Belanja Modal gedung dan bangunan karena adanya Pembangunan Kantor Induk Balai Besar Karantina Pertanian dan pembangunan Kandang di wilayah kerja Bajoe Bone dan wilayah kerja Jeneponto. Sedangkan pada tahun anggaran 2017 tidak dianggarkan lagi

Perbandingan Belanja Modal adalah :  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	815.489.000,00	634.487.818,00	28,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.295.706.800,00	5.614.387.700,00	-76,92
Belanja Modal Lainnya	55.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.166.195.800,00</b>	<b>6.248.875.518,00</b>	<b>-65,34</b>
Pengembalian Belanja Modal	-1.720.000,00	-6.389.200,00	-73,08
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.164.475.800,00</b>	<b>6.242.486.318,00</b>	<b>-65,33</b>



#### B.4.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp815.489.000,00 dan Rp634.487.818,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 28,53% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh **pengadaan kendaraan roda 4(empat) 1(satu) unit dari anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dianggarkan pada revisi dipa ke 4(empat)**

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	815.489.000,00	634.487.818,00	28,53
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>815.489.000,00</b>	<b>634.487.818,00</b>	<b>28,53</b>
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>815.489.000,00</b>	<b>634.487.818,00</b>	<b>28,53</b>

#### B.4.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.293.986.800,00 dan Rp5.607.998.500,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami penurunan sebesar -76,93% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh hanya melakukan pembangunan fasilitas Gedung dan Bangunan di wilayah Kerja Jeneponto yaitu pembangunan Laboratorium dan gudang Pakan ternak, serta pemeliharaan Gedung kantor di wilker Pelabuhan Laut Makassar

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.295.706.800,00	5.614.387.700,00	-76,92
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.295.706.800,00</b>	<b>5.614.387.700,00</b>	<b>-76,92</b>
Pengembalian Belanja	-1.720.000,00	-6.389.200,00	-73,08
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.293.986.800,00</b>	<b>5.607.998.500,00</b>	<b>-76,93</b>

### B.4.3 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp55.000.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh **adanya pengadaan software baru untuk pelaksanaan pelayanan di wilayah kerja Pelabuhan laut, wilayah kerja Bandara Hasanuddin yaitu pengadaan nomor antrian.**

Perbandingan Belanja Modal Lainnya  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	55.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 ASET LANCAR

#### C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp17.266.800,00 dan Rp 4.306.679,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan Imbalan Jasa Pemeriksaan / Pengawasan Karantina (423215) berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan tersebut disetorkan dengan sistem billing online. Adanya Saldo tersebut merupakan selisih dari Simponi(Online) sesuai dengan tanggal kwitansi dan nomor billing. Dan dicatat di laporan keuangan sesuai tanggal buku.

Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
BP kas Tunai dan Bank	17.266.800,00	4.306.679,00
Lain-lain	0.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>17.266.800,00</b>	<b>4.306.679,00</b>

### C.1.2 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.992.170,00 dan Rp4.204.125,00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Sewa Tanah Wilker Paotere	4.992.170,00	4.204.125,00.
dst...	0.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>4.992.170,00</b>	<b>4.204.125,00.</b>

### C.1.3 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp635.780.527,00 dan Rp966.608.477,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	635.780.527,00	293.254.308,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	2.905.000,00
Suku Cadang	0,00	424.554.478,00
Bahan Baku	0,00	245.894.691,00
<b>Jumlah</b>	<b>635.780.527,00</b>	<b>966.608.477,00</b>

## C.2 ASET TETAP

### C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp85.670.372.000,00 dan Rp20.717.512.800,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>20.717.512.800,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	19.949.402.200,00
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>85.670.372.000,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

- Adanya revaluasi Aset dari Kantor Perbendaharaan dan Kekayaan Negara (KPKNL) Makassar dengan surat nomor BAR-IP-311/WKN/KNL.02/2017 tanggal 19 Desember 2017

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	322,00m <sup>2</sup>	YOS SUDARSO Rt.-, TANETE RIATTANG	141.358.000,00
2.	297,00m <sup>2</sup>	POROS KAB BONE Rt.01/04, KAJUARA	106.000.000,00
3.	1.122,00m <sup>2</sup>	PELABUHAN LAUT Rt.-, BATANG JENEPONTO	36.000.000,00
4.	1.000,00m <sup>2</sup>	BANDARA BARU Rt.001, MANDAI	412.800.000,00
5.	837,00m <sup>2</sup>	PEL. SINJAI Rt.002, SINJAI UTARA	436.800.000,00
6.	506,00m <sup>2</sup>	YOS SUDARSO Rt.003, UJUNG BULU	90.000.000,00
7.	6.000,00m <sup>2</sup>	DUSUN PATTENE Rt.005, MAROS BARU	64.000.000,00
8.	4.000,00m <sup>2</sup>	PATTENE Rt., MAROS	295.200.000,00
9.	91,00m <sup>2</sup>	NUSANTARA NO.444 Rt., UJUNG TANAH	234.789.000,00
10.	5.000,00m <sup>2</sup>	VETERAN/KESEHATAN Rt., TANETE RIATTANG	876.000.000,00
11.	7.759,00m <sup>2</sup>	PERINTIS KEMERDEKAAN NO.12 Rt., BIRINGKANAYA	13.642.649.700,00
12.	5.000,00m <sup>2</sup>	CAKALANG Rt.005, TANETE RIATTANG TIMUR	2.355.000,00
13.	1.798,00m <sup>2</sup>	MAROS BARU Rt., TAMAPPA DUAE	137.907.600,00
14.	2.200,00m <sup>2</sup>	PERINTIS KMERDEKAAN KM.12 Rt.05, BIRINGKANAYA	14.643.834.000,00
15.	4.710,00m <sup>2</sup>	PERINTIS KEMERDEKAAN KM.12 Rt.05, BIRINGKANAYA	30.128.033.000,00
16.	848,00m <sup>2</sup>	PELABUHAN LAUT JENEPONTO Rt.05, BUNGENG	231.590.000,00
17.	417,00m <sup>2</sup>	MANDAI Rt.-, MANDAI	192.913.600,00
18.	1.287,00m <sup>2</sup>	KARANTINA Rt.-, PANAKUKKANG	1.285.851.800,00
19.	3.961,00m <sup>2</sup>	KAPASA RAYA NO.17 KM.14 DAYA Rt.A/RWA/V, BIRINGKANAYA	2.392.444.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>85.670.372.000,00</b>

**Nilai saldo Tanah pada Neraca SAIBA sama dengan nilai total KIB tanah pada aplikasi SIMAKBMN.**

### C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp30.718.200.161,00 dan Rp29.882.711.161,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>29.882.711.161,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	815.489.000,00
Reklasifikasi Masuk	20.000.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>30.718.200.161,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-23.563.471.451,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>7.154.728.710,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembelian berupa Pengadaan Kendaraan Roda 4(empat) 1 unit, Pengadaan Ac, Pengadaan Komputer, untuk Reklasifikasi Masuk berasal dari Server komputer yang mengalami pergeseran aset dari Belanja Jaringan 1 paket dengan server, sehingga server dalam paket Jaringan (Kode:6361) dikeluarkan denganReklasifikasi keluar (berita acara terlampir) kemudian Reklasifikasi Masuk ke Peralatan dan Mesin senilai Rp.20.000.000,00
2. Akumulasi penyusutan merupakan barang yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan operasional perkantoran.

### C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp36.306.298.700,00 dan Rp24.289.603.575,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>24.289.603.575,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	276.685.353,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	285.225.800,00
Pengembangan Nilai Aset	171.600.000,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	13.285.288.219,00
Pengembangan Melalui KDP	560.475.647,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>36.306.298.700,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-617.215.136,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>35.689.083.564,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Adanya revaluasi Aset dari Kantor Perbendaharaan dan Kekayaan Negara (KPKNL) Makassar dengan surat nomor BAR-IP-311/WKN/KNL.02/2017 tanggal 19 Desember 2017
2. Adanya pembelian dan pembangunan Gedung yaitu pembangunan Kandang di wilker Bajoe Bone dan Wilker di jeneponto.

#### C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.080.367.724,00 dan Rp8.123.289.847,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>8.123.289.847,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	489.284.603,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>8.080.367.724,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-3.403.850.764,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>4.676.516.960,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Penyusutan nilai Jalan dan Jaringan

#### C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp32.745.000,00 dan Rp32.745.000,00.

#### C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-27.584.537.351,00 dan Rp-26.080.972.619,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	30.718.200.161,00	-23.563.471.451,00	7.154.728.710,00
2.	Gedung dan Bangunan	36.306.298.700,00	-617.215.136,00	35.689.083.564,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.080.367.724,00	-3.403.850.764,00	4.676.516.960,00
4.	Aset Tetap Lainnya	32.745.000,00	0,00	32.745.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>75.137.611.585,00</b>	<b>-27.584.537.351,00</b>	<b>47.553.074.234,00</b>

**C.3 ASET LAINNYA**

**C.3.1 ASET TAK BERWUJUD**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp53.000.000,00 dan Rp18.000.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Aset Tak Berwujud  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	55.000.000,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Reklasifikasi Keluar	-20.000.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>53.000.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-2.254.349.807,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>-2.201.349.807,00</b>

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah berupa:

1. Reklasifikasi Keluar merupakan server yang dibelanjakan satu paket dengan jaringan sehingga untuk menyesuaikan pencatatan sebagai Peralatan dan mesin.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	53.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>53.000.000,00</b>

### C.3.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.316.654.766,00 dan Rp2.316.654.766,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Karantina Pertanian Makassar serta dalam proses penghapusan dari BMN. Telah diadakan penghapusan Barang milik negara senilai Rp.1.642.502.425, dengan risalah lelang nomor 703/72/2017 tanggal 27 September 2017. Sedangkan sisanya Rp. 674.152.341. telah diadakan lelang tapi gagal karena tidak ada peminat yaitu berupa Kendaraan Roda4(empat) 2(dua) unit , Kendaraan Roda 2(dua), 1(satu) unit dan Kendaraan Roda Enam 1(satu) unit. Serta Peralatan Mesin lainnya. dan telah diusulkan untuk diadakan lelang ulang dengan penurunan nilai limit.

### C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-2.264.474.807,00 dan Rp-2.211.635.789,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	53.000.000,00	-10.125.000,00	42.875.000,00
2.	Aset Lain-lain	2.316.654.766,00	-2.254.349.807,00	62.304.959,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>2.369.654.766,00</b>	<b>-2.264.474.807,00</b>	<b>105.179.959,00</b>

### C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

#### C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp49.825.851,00 dan Rp243.392.708,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	185.860.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	49.825.851,00	57.532.708,00
<b>Jumlah</b>	<b>49.825.851,00</b>	<b>243.392.708,00</b>

## C.5 EKUITAS

### C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp59.893.017.425,00 dan Rp59.893.017.425,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.181.002.543,00 dan Rp2.366.589.035,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	18.632.714,00	35.638.292,00	-47,72
Pendapatan Jasa Lainnya	1.200.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	4.161.053.794,00	2.330.395.467,00	78,56
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	116.035,00	555.276,00	-79,10
<b>Jumlah</b>	<b>4.181.002.543,00</b>	<b>2.366.589.035,00</b>	<b>76,67</b>

Peningkatan pendapatan Sensor/karantina Pengawasan/Pemeriksaan karena adanya peningkatan pengawasan komoditi wajib Periksa Karantina

### D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.716.435.268,00 dan Rp11.716.435.268,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	6.618.971.800,00	6.925.839.120,00	-4,43
Beban Pembulatan Gaji PNS	85.518,00	93.831,00	-8,86
Beban Tunj. Anak PNS	131.352.010,00	136.152.538,00	-3,53
Beban Tunj. Beras PNS	366.083.160,00	382.208.700,00	-4,22

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Tunj. Fungsional PNS	736.400.000,00	791.500.000,00	-6,96
Beban Tunj. PPh PNS	32.390.070,00	99.387.414,00	-67,41
Beban Tunj. Struktural PNS	141.850.000,00	140.465.000,00	0,99
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	481.991.710,00	503.037.046,00	-4,18
Beban Tunjangan Umum PNS	113.385.000,00	125.945.000,00	-9,97
Beban Uang Lembur	1.988.632.000,00	1.026.962.000,00	93,64
Beban Uang Makan PNS	1.105.294.000,00	1.117.126.000,00	-1,06
<b>Jumlah</b>	<b>11.716.435.268,00</b>	<b>11.248.716.649,00</b>	<b>4,16</b>

Peningkatan Belanja Pegawai untuk menambah kesejahteraan pegawai yang melakukan lembur karena adanya peningkatan kegiatan lembur di malam hari terutama di Bandara dan pelabuhan Laut.

### D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp927.644.378,00 dan Rp1.370.330.616,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	3.675.000,00	531.682.175,00	-99,31
Beban Persediaan konsumsi	923.969.378,00	834.081.441,00	10,78
Beban persediaan lainnya	0,00	4.567.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>927.644.378,00</b>	<b>1.370.330.616,00</b>	<b>-32,31</b>

### D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.371.846.894,00 dan Rp4.215.120.890,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Bahan	709.738.200,00	846.416.275,00	-16,15
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	12.500.000,00	-100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	207.259.000,00	221.670.000,00	-6,50
Beban Honor Output Kegiatan	44.000.000,00	26.500.000,00	66,04
Beban Jasa Lainnya	130.450.604,00	19.700.000,00	562,19
Beban Jasa Profesi	0,00	28.500.000,00	-100,00
Beban Keperluan Perkantoran	1.886.651.300,00	1.701.569.663,00	10,88
Beban Langganan Air	6.388.868,00	5.422.175,00	17,83
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	136.263.570,00	0,00	0,00
Beban Langganan Listrik	576.778.181,00	592.380.216,00	-2,63
Beban Langganan Telepon	46.676.624,00	128.260.436,00	-63,61
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	601.651.100,00	510.159.000,00	17,93
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.796.681,00	36.000.000,00	-70,01
Beban Sewa	15.192.766,00	86.043.125,00	-82,34
<b>Jumlah</b>	<b>4.371.846.894,00</b>	<b>4.215.120.890,00</b>	<b>3,72</b>

#### D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.103.873.353,00 dan Rp1.875.417.408,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	632.943.000,00	362.684.878,00	74,52
Beban Pemeliharaan Jaringan	100.000.000,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.082.644.587,00	860.609.400,00	25,80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	159.999.928,00	99.944.600,00	60,09
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.417.400,00	43.514.700,00	-92,15
Beban Persediaan suku cadang	124.868.438,00	508.663.830,00	-75,45
<b>Jumlah</b>	<b>2.103.873.353,00</b>	<b>1.875.417.408,00</b>	<b>12,18</b>

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas>.

#### D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.698.180.618,00 dan Rp2.817.702.223,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	882.701.425,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	275.700.000,00	1.315.500.000,00	-79,04
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	468.659.493,00	1.502.202.223,00	-68,80
Beban Perjalanan Tetap	71.119.700,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.698.180.618,00</b>	<b>2.817.702.223,00</b>	<b>-39,73</b>

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas>.

#### D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.651.190.370,00 dan Rp4.757.991.325,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Amortisasi Software	5.250.000,00	2.625.000,00	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	745.337.450,00	461.779.157,00	61,41
Beban Penyusutan Irigasi	34.047.026,00	35.855.548,00	-5,04
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	339.393.630,00	163.958.380,00	107,00
Beban Penyusutan Jaringan	493.311.224,00	493.265.453,00	0,01

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	47.589.018,00	45.590.570,00	4,38
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.986.262.022,00	3.554.917.217,00	-16,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.651.190.370,00</b>	<b>4.757.991.325,00</b>	<b>-2,25</b>

#### D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

##### Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-553.741.894,00	-9.107.869,00	5.979,82
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-54.515.000,00	-3.180.150,00	1.614,23
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	12.930.657,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	554.455.430,00	21.204.950,00	2.514,75
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	11.600.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	402,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>-29.270.807,00</b>	<b>8.917.333,00</b>	<b>-428,25</b>

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 703/72/2017 tanggal 27 September 2017 senilai 11.600.000,- telah disetorkan dengan NTB:171003726022;NTPN:284941BFGF37S5I

## E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 57.819.635.314,00 dan Rp 56.771.269.011,00.

### E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-21.317.439.145,00 dan Rp-23.909.772.743,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp78.761.667.522,00 dan Rp20.648.618,00.

#### E.4.1 KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

#### E.4.2 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp45.003.457.000,00 dan Rp-34.065.682,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2017.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	1.720.000,00
Konstruksi Dalam pengerjaan	-1.720.000,00
Peralatan dan Mesin	20.000.000,00
Software	-20.000.000,00
Tanah	45.003.457.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>45.003.457.000,00</b>

#### E.4.3 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp34.235.500,00 dan

Rp54.714.300,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

incian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2017.

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	27.231.500,00
Suku Cadang	7.004.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>34.235.500,00</b>

#### E.4.4 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

#### E.4.5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp33.723.975.022,00 dan Rp0,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2017.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	19.949.402.200,00
Gedung dan Bangunan	10.722.708.325,00
Jalan dan Jembatan	210.910.812,00
Irigasi	-253.832.935,00
<b>Jumlah</b>	<b>33.723.975.022,00</b>

#### E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp18.672.976.148,00 dan Rp24.937.490.428,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.



Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	22.824.352.597,00
Diterima dari Entitas Lain	-4.192.573.079,00
Transfer Keluar	-93.100,00
Transfer Masuk	41.289.730,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.672.976.148,00</b>

#### E.5.1.DITERIMA DARI ENTITAS LAIN(DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN(DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2017 saldo DDEL adalah sebesar Rp-4.192.573.079,00 sedangkan DKEL sebesar Rp22.824.352.597,00.

#### E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp41.289.730,00 yang terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp41.289.730,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2017.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi		41.289.730,00
<b>Jumlah</b>			<b>41.289.730,00</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-93.100,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2017.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Barang Konsumsi		-93.100,00
<b>Jumlah</b>			<b>-93.100,00</b>

#### E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp59.893.017.425,00 dan Rp59.893.017.425,00.

## F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Penyetoran Kas di bendahara Penerima telah dilakukan sebesar Rp.17.266.800 dengan rincian :

- Rp.17.056.800 NTB :000000609362 NTPN: 5F5D45TPQVV4SE49 – 04-01-2018.
- Rp.160.000,- NTB:000000419595 , NTPN :AC2414T2JLT2VSBP - 03-01-2018
- Rp.50.000,- NTB:000000176654, NTPN:5BF1D3RDTVJPNKJ9 - 02-012018

Hal ini terjadi karena pergantian tahun anggaran.

Pembayaran Listrik sebesar Rp.39.545.125, dan Telepon sebesar Rp.10.280.726 dilakukan setelah adanya Uang Persediaan (UP) untuk tahun Anggaran 2018.

### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Semester II Tahun anggaran 2017 terjadi Penggantian Rekening Bendahara Pengeluaran BBKP Makassar dari Rekening Nomor 034301000443309 Bank BRI Cabang Tamalanrea dengan Surat penutupan Rekening BRI Nomor B.644.XIII/KC/OPS/07/2017 10 Juli 2017 dengan saldo Rp.0 (nol) an. BPG 054 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dan Pembukaan rekening di Bank BNI dengan Nomor Rekening 3333455675 an. BPG 054 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sebagaimana terlampir.

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

# MEMO PENYESUAIAN